MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari/Tanggal	:	Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu	:	15.55 Wita
Tempat	:	Ruang Sidang Persiapan PTUN Kupang
Acara	:	Rapat Tindak Lanjut Monev Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III
Peserta Rapat	:	Wakil Ketua, seluruh Hakim dan seluruh Pegawai PTUN Kupang

Jalannya rapat ;

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Wakil Ketua PTUN Kupang menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah; Rapat Tindak Lanjut Monev Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III.

1. Pimpinan mengawali rapat dengan menegaskan kembali terkait hasil monev Survey Kepuasan Masyarakat untuk segera dibuatkan Barcode Survey Kepuasan dan diletakan di setiap meja PTSP.
2. Selanjutnya pimpinan juga memerintahkan agar segera dibuatkan kotak saran dan keluhan dan di pasang di ruang lobby PTUN Kupang dan agar dicek setiap bulannya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS MONITORING EVALUASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE : JULI – SEPTEMBER 2026

I. PENGANTAR / PENDAHULUAN

Rapat dibuka oleh pimpinan selaku Agen Perubahan PTUN Kupang tahun 2026. Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk respons cepat dan tindak lanjut konkret terhadap catatan serta rekomendasi yang muncul pada laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan III. Fokus utama tindak lanjut adalah digitalisasi pelayanan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menilai performa pelayanan pengadilan.

II. PEMBAHASAN & TINDAK LANJUT

Berdasarkan rekomendasi hasil Monev SKM Triwulan III, berikut adalah poin-poin progres tindak lanjut yang telah berhasil diimplementasikan:

1. Pembuatan Barcode SKM: Kepaniteraan Hukum telah membuat dan menerbitkan Barcode khusus Survey Kepuasan Masyarakat. Langkah ini diambil guna mempermudah aksesibilitas masyarakat atau pengguna layanan dalam memberikan penilaian secara digital dan real-time tanpa perlu mengisi formulir fisik.
2. Implementasi Buku Tamu Elektronik: Setiap pengunjung sidang kini diwajibkan dan diarahkan untuk mengisi buku tamu elektronik yang tersedia di area meja pelayanan/front office.
3. Mekanisme Pengisian Barcode SKM: Petugas PTSP dan Satpam secara aktif mengarahkan para pengunjung sidang untuk memindai (scan) dan mengisi barcode survey kepuasan masyarakat setelah mereka selesai menerima layanan atau mengikuti proses persidangan.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev SKM Triwulan III telah berjalan dengan baik melalui penyediaan fasilitas barcode dan optimalisasi pengisian instrumen survey secara digital. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan indeks persepsi pelayanan publik di PTUN Kupang serta meminimalisir adanya data survey yang tidak terisi.

IV. REKOMENDASI / LANGKAH SELANJUTNYA

1. Konsistensi Petugas: Mempertahankan dan menjaga konsistensi petugas piket/pelayanan dalam mengarahkan setiap pengunjung sidang tanpa terkecuali.
2. Pemeliharaan Perangkat: Melakukan pengecekan berkala terhadap perangkat elektronik buku tamu agar tidak terjadi kendala teknis di lapangan.
3. Evaluasi Berkala: Melakukan rekapitulasi data hasil scan barcode secara mingguan untuk memantau tren kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Kupang, 14 Oktober 2026
Wakil Ketua PTUN Kupang

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 197008242005022002